

Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan

Prayudi Rahmatullah^{1*}, Tutik Hamidah¹

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pendudukan Taliban terhadap pemerintah Afganistan dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik dan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendudukan Taliban atas Afganistan tidak terlepas dari nuansa politik yang melibatkan banyak aktor di antaranya Al-Qaeda, Iran, Arab Saudi, dan Taliban. Menurut Ibnu Taimiyah dalam berpolitik hendaknya berlandaskan ajaran Tuhan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menciptakan tatanan negara yang aman dan damai diperlukannya pemimpin yang adil dan amanah serta perlunya menghindari pertikaian agar tidak terjadi bubarnya suatu negara.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, Politik, Negara, Taliban, Afghanistan

Abstract: This study aims to analyze the Taliban occupation of the Afghan government in the perspective of Ibn Taimiyah's thought about politics and the state. The research method used is library research. This study concludes that the Taliban's occupation of Afghanistan is inseparable from the political nuances that involve many actors including Al-Qaeda, Iran, Saudi Arabia, and the Taliban. According to Ibn Taimiyah, in politics, it should be based on God's teachings which are sourced from the Qur'an and Hadith. In creating a safe and peaceful state order, a just and trustworthy leader is needed and the need to avoid conflict in order to prevent the dissolution of a country.

Keywords: Ibn Taimiyah, Politics, State, Taliban, Afghanistan

Pendahuluan

Dalam diskursus politik unsur utama yang menjadi objek kajian adalah negara (State) istilah state yang berarti negara berasal dari bahasa latin, status atau stato (itali), etat (Prancis), dan State (Inggris), (Halim, 2013). Kajian tentang politik dan konsep negara menjadi sangat menarik jika dikaji dari berbagai aspek termasuk dalam hal ini adalah pemikiran Ibnu Taimiyah. Sebagai agama yang universal, Islam tidak secara spesifik membahas tentang politik dan Negara, namun secara mufaham

berdasarkan teks yang ada di alqur'an banyak ayat-ayat yang menyinggung perihal prinsip-prinsip bernegara, tentang prinsip keadilan, persamaan, kesetaraan dan dimensi lainnya. (Suharti, 2015)

Secara historis kajian tentang politik dan negara baru muncul ketika periode Bani Abbasiyyah. (Lapidus & Mas'adi, 1999) Pada periode sebelumnya para cendekia muslim hanya terfokus pada persoalan, fiqh, ahlak, hadis, tafsir saja, pada dinasti Abbasiyyah mulai bermunculan aliran-aliran baru yang memberikan nuansa baru

* Corresponding Author: Prayudi Rahmatullah (prayudirengggaing@uin-malang.ac.id). UIN Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

dalam khasanah keilmuan utamanya tentang Islam, seperti Sunni, Syiah, Khawarij.

Perihal asal-usul negara secara terperinci belum ditemukan dalam teks-teks Al-Qur'an, sehingga perlu penafsiran dan pemikiran ulang untuk mengkajinya, begitupun pemikiran Ibnu Taimiyah yang lebih menitikberatkan kepada bahasan mengenai Imamah. Apakah Nabi Muhammad pernah mewasiatkan tentang konsep bernegara yang ideal, ketika membicarakan tentang pemahaman Sunni, Muktazillah dan Khawarij Ibnu Taimiyah dengan lantang menolak atas keyakinan golongan Syiah Imamiyah yang secara tekstual mengatakan bahwa Imamah hanyalah untuk golongan Ali, karena menurut Ibnu Taimiyahh Syiah Zaidiyah tidaklah seperti itu (Khan, 2007).

Ibnu Taimiyah lebih sepakat dengan teori Politik golongan Sunni yang menyatakan bahwa Imamah bukan salah satu dari asa dan praktek dalam beragama sebagaimana yang dipahami oleh golongan Syiah. Karena menurut Ibnu Taimiyah konsep tentang Imamah adalah masalah Furuiyah yang berkaitan dengan perbutaan manusia untuk menjaga dan memelihara kewajiban dalam beragama (Khan, 2007).

Berangkat dari beberapa gagasan diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan yang menyita perhatian saat ini tentang pengkudetaan Taliban atas pemerintahan Afghanistan. Konflik yang terjadi di Afghanistan tidak lepas dari nuansa politik yang tidak pernah selesai hingga saat ini, yang banyak melibatkan aktor di dalamnya, seperti Al-Qaeda, Iran, Arab Saudi dan Taliban, dan yang paling menyita perhatian adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam konstlasi politik di Afghanistan. Semenjak tahun 1978 Afghanistan adalah negara yang sering terjadi pertikan dan konflik, ditahun 20014 The Guardian mengatakan bahwa Afghanistan adalah negara yang kedua yang

sering konflik dengan angka kredit mendekati 3, 42 dibawah negara Suriah.(Khurun'in, 2017)

Faktor lainnya adalah Negara Afghanistan menduduki posisi tertinggi dalam hal bantuan luar negeri untuk mengatasi konflik sipil yang berkepanjangan. Berdasarkan data dari organization for economic cooperation and Development, afgnistan adalah negara mendapat bantuan sebesar 5.811 juta US dolar pada tahun 2011-2012 (Khurun'in, 2017).

Baru-baru ini Pasukan Taliban berhasil mengepung Afghanistan, Kabul pada ahad (15/8/2021) saat Amerika Serikat tengah mengevakuasi diplomator dari kedutaann dengan mengunakan helykopter. Banyak kekhawatiran yang bermunculan yang dialami oleh penduduk Afghanistan sebagaimana yang dilansir dijatim network (*Jatim Network*, n.d.) Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi yang akan dialami oleh penduduk Afghanistan diantaranya isu balas dendam Taliban terhadap antek-antek Amerika. Kemudian dkhawatirkan Taliban akan menerapkan kembali Interpretasi keras hokum Islam seperti tahun 1996-2001, dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk sekolah atau bekerja diluar rumah. Dan masih banyak kekahatiran-khawatiran lainnya akibat Pendudukan Taliban atas pemerintahan Afghanistan ini.

L'histoire s'est repete. Sejarah berulang. Afghanistan jatuh kembali ke tangan Taliban, dalam waktu cepat, pada 15 Agustus 2021, di luar perkiraan intelijen AmerikaSerikat (AS). Diplomat dan militer AS tunggang-langgang lari dari negeri yang ditaklukkannya hampir dua dasawarsa lalu. Kejadian ini menyerupai jatuhnya Saigon di Vietnam pada tahun 1975, AS melarikan diri dalam suasana chaos, mengabaikan para olaboratornya (Nainggolan, 2021) secara menyedihkan. Perundingan damai dan kesepakatan Trump

Taliban yang telah berlangsung beberapa kali pada semester kedua tahun 2020 membawa dampak perubahan signifikan bagi masa depan Afghanistan dan Timur Tengah, dan kebijakan AS di kawasan. Keputusan AS, apapun alasannya, baik untuk mengurangi risiko pengorbanan finansial dan nyawa militer AS dalam jangka panjang, maupun demi memberi ruang bagi masa depan Afghanistan, menjadi kontroversial.

Tulisan ini membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah yang pada zamannya dikenal sebagai politikus dan negarawan ulung, yakni tentang politik dan hakekat negara, dan juga menarik untuk dibahas tentang pendudukan tentara Taliban atas pemerintahan Afghanistan.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan atau dengan kata lain disebut sebagai Penelitian *Library Research* (Bungin, 2017) yakni usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan. Berupa suatu kegiatan dengan cara mengumpulkan beberapa data seperti buku. Literature sebagai sumber datanya, yang berkesesuaian dengan fokus penelitian, selanjutnya data tersebut diolah lagi dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli guna mendukung sebuah penelitian yang fokus dan sebagai landasarn teori ilmiah. dan sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana objek kajian didalamnya tdaai berupa angka, yakni sebuah penelitian yang menggunakan suatu analisis atas semua permasalahan yang dibahas dalam penelitian. dalam hal ini menulis menggunakan diskriptif analisis (Moleong & Surjaman, 1991) setelah data dianalisis maka yang dilakukan peneliti adalah menyajikannya, dalam kontek ini peneliti menyusunnya sesuai dengan relevansi dari penelitian. Untuk menghasilkan kesimpulan yang konstruktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Singkat Ibnu Taimiyah

Namanya Ahmad ibn Abdil Halim ibn Abdissalam ibn Abdillah ibn Al-Khadr ibn Muhammad ibn Al-Khadr ibn Ali ibn Abdillah ibn Taimiyah An-Namiri Al-Harrani Ad--Dimasyqi Abu Al-Abbas Al-Taqiyyudin Syekh Islam.(Farid, Ahmad, 2006) Ibnu Taimiyah (Rabi`ul Awal) lahir di Harran pada hari Senin, 661 M. Itu 22 Januari 1263 M, dan itu adalah wilayah yang terletak di tenggara Suriah pada tahun M. Ibnu Taimiyah lahir dalam keluarga ulama dan ilmuwan terkenal. Ayahnya, Syihabuddin Abu Ahmad, adalah seorang syekh, misionaris dan hakim di kotanya. Kakeknya Syekh Islam Majdudin Abu al Birkan adalah Fakih Hambali, Imam, Hadits, Tafsir , Usul, Nahwu dan huffaz, dan pamannya bernama Fakhruddin, ia adalah seorang ulama dan penulis Muslim terkenal (Khan, 2007).

Ketika berusia enam tahun, ayahnya Syekh Syihabuddin Abdul Halim bin Abdus Salam membawanya bersama saudaranya ke Damaskus. Ia tinggal di sana, belajar dan memperdalam berbagai cabang ilmu keislaman dari para ulama di kota itu. Di bidang hadits, ia belajar dari Syekh Samsuddin Al-Hambali, Syekh Jalaluddin Al-Hanafi dan lain-lain dari ahli hadis terkemuka negara, Ibn Abdu Le Daim et al. Kemudian dia belajar fikih, arab, tafsir dan ushul fiqh (Nasution, 2002).

Tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah antara lain al-Radd `al-Manthiqiyyin (Jawaban Mantiq), Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah (Metode Hadis Nabi), Majmu`ah al-Fatawa, al-Radd ala al-Hululiyah wa al-Ittihadiyyah (tanggapan terhadap pemahaman Hulul dan Ittiah troy), terhadap dasar-dasar Tafsir al Rufsydah Ibsydah (Jawaban terhadap filsafat Ibn al-Iklasyil` wil (pidato tentang ayat-ayat

Mutasyabihah dan Ta`wil), al-Jawab al-Shahih li Man Baddala Imam menggantikan al-Masih), al-Radd `ala al-Nushairiyah (tanggapan terhadap pemahaman Nushairiyah), Risalah Qubrus alMa`ad (ditentukan tujuan), Tsubut al-Nubuwwah (kehadiran nabi), Ikhlas al-Ra`iya wa al-Racerity pemimpin dan LED) (Jindan & Masrohin., 1995) Setelah kematiannya, ia melahirkan 4.444 murid yang kemudian menjadi pesohor dan intelektualis bagi umat Islam, seperti al-Zahabi (1274-1348), Ibn al-Qayim al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Mohamd Ibn Abdul Wahab dan masih banyak yang lainnya (Majid fakhry;, 2002)

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Politik

Ketika masa Rasulullah, khulafaurrosyidin, hingga periode pertengahan konsep tentang politik dan bernegara tidak begitu masif diperbincangkan karena lebih mengedepankan musyawarah dan prinsip-prinsip persamaan, keadilan dan toleransi, namun tidak seirama dengan periode sesudahnya, dimana politik praktis sangat kental bahkan menyisahkan konflik internal antar sesama muslim. Pada periode klasik bermunculan dinasti-dinasti yang dengan kemapanannya menyelimuti dunia Islam, diantaranya Bani Umayyah (661-750 M), dan Bani Abbasiyah (750-1258 M) masa ini sangat menyita perhatian dikalangan eropa dan benua lainnya, pada periode bani Umayyah kajian akan politik tidak terlalu massif, karena masih terfokus pada perluasan wilayah kekuasaan, baru pada era bani Abbasiyah kajian tentang Politik mulai dibahas (Suharti, 2015). Hingga akhirnya bermunculannlah beberapa pemikiran tentang konsep politik dan negara utamanya dari negarawan seperti Ibnu Taimiyah.

Akar penyebab konflik di Afghanistan banyak dan beragam. Mulai dari Perang saudara yang rumit. Partisipasi Taliban dan Al-Qaida juga merupakan faktor analisis yang penting untuk

mencari solusi atas konflik tersebut. Ditambah dengan invasi militer AS pasca 9/11, hal ini justru menambah kompleksitas situasi politik di Afghanistan. Ketika komunitas internasional memperhatikan pemboman Al-Qaeda di Afghanistan, itu menciptakan masalah baru.

Pada pembahasan ini penulis akan menyajikan tentang pemikiran Politik dan konsepsi Negara Ibnu Taimiyah tentang polemik dan Konflik yang terjadi antara pemerintahan Afghanistan dan Taliban, bagaimana konstlasi perpolitikan di negeri ini, apakah sudah sesuai dengan pemikiran yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah tentang politik dan Negara.

Menurut Ibnu Taimiyah, konsep negara dan pemikiran politik adalah hasil dari pemikiran yang mendalam para ulama dalam berijtihad untuk merefleksikan pemikiran rasional sebagai upaya untuk mencari dasar intelektual tentang peran dan fungsi negara sebagai kator instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya (Swasana, 2018) Adanya ijtihad politik ini tidak lain adalah sebagai bentuk untuk mendapatkan legitimasi secara berkesinambungan untuk memperjuangkan tatanan politik dalam bernegara.

Kisruh dan pengkudetaan Taliban atas pemerintahan Afghanistan tidak lepas dari peran pemegang kekuasaan atau Imaroh. menurut Ibnu Taimiyah pemegang kekuasaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan menerima curahan hati dan keingan rakyatnya. Sehingga hubungan antara pemerintah dengan rakyat dapat teralin dengan baik.(IBNU Taimiyah, n.d.) Ketika hubungan itu dapat dijaga baik bagi pemerintah maupun rakyat, maka menurut Ibnu taimiyah prinsip keadilan dapat tercapai. Nampaknya teori politik Ibnu taimiyah sama dengan konsep pemerintahan dan bernegara modern, dimana mendasarkan kepada kepentingan manusia sebagai

mahluk sosilogis, maka menurutnya perlu ada interpretasi ulang terhadap konsep negara, negara harus bisa mengakomodir kepentingan rakyat atau dalam Bahasa Ibnu Taimiyah disebut sebagai “manusia yang bebas” (Jindan & Masrohin., 1995)

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Negara

Negara menurut Robert Maciver adalah asosiasi yang bertugas untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan maksud memberikan kekuasaan yang bersifat memaksa (rosyada, 2003) Didalam alqur'an dan hadist, tidak didapati teks atau ayat yang secara spesifik membahas tentang konsep negara. Bukan berarti alquran tidak mengajarkan bernegara dengan baik, masih didapat beberapa ayat atau teks yang membahas tentang prinsip-prinsip bernegara seperti prinsip Keadilan (QS. 5:8) Musyawarah (QS. 42:38) Perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10) Keamanan (QS. 2:126) Persamaan (QS. 16:97) sehingga memunculkan beberapa interpretasi tentang konsep negara yang ideal. Islam hanya memunculkan prinsip dasar yang sifatnya umum, dan tugas manusialah yang menafsirkan dan mendiskusikan tentang konsep Negara, karena pembahasan ini tidak pernah usai sehingga memungkinkan diciptakannya formula baru terhadap konsep Negara demi terciptanyakesajahteraan bagi rakyatnya (Engineer et al., 2000)

Para intelektual muslim menyandarkan dan memandang konsep negara dalam kerangka yang berbeda. Seperti pemikiran Ibnu Taimiyah yang lebih sepakat dengan teori Politik golongan Sunni yang menyatakan bahwa Imamah bukan salah satu dari asas dan praktek dalam beragama sebagaimana yang dipahami oleh golongan Syiah. Karena menurut Ibnu Taimiyah konsep tentang Imamah adalah masalah Furuiyah yang berkaitan dengan perbutaan manusia untuk menjaga dan memelihara

kewajiban dalam beragama.(Ibnu Taimiyah, 1962) Lantas bagaimana dengan Taliban, Apakah Taliban masuk golongan syiah, sunni atau khawarij? Taliban lahir dari golongan pelajar dan pesantren yang menganut aliran Sunni, namun bukan sunni yang humanis, melainkan Sunni garis keras, namun nampaknya pergolakan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan tidak murni atas dasar perbedaan aliran.

Hal ini terbukti ketika negara Iran menjalin kerjasama dengan Taliban yang dari segi kepercayaan dan aliran sangat berbeda, Iran dengan keyakinan Syiahnya, dan Taliban dengan Sunni radikalnya, karena memang mayoritas penduduk Afghanistan adalah dari Islam Sunni 90 %, 19 % Syiah, dan 1 % agama lainnya, tetapi perbedaan ini sepertinya tidak lagi penting. Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara Iran dan Taliban mengambil pendekatan Pragmatis untuk mencapai tujuan bersama yakni menyingkirkan pengaruh Amerika Serikat (Knipp, 2021).

Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa berkelompok atau berkoalisi untuk mewujudkan kepentingan bersama adalah boleh, Ibnu Taimiyah berpendapat jika berkelompok untuk memelihara kapasitas alam adalah keharusan. Dari pemikiran ini memunculkan teori lembaga Negara. Ia menitikberatkan pentingnya bagi institusi untuk mewujudkan masyarakat dalam meraih keadilan, Dalam kasus pendudukan Taliban atas Afghanistan ini. Menurut Ibnu Taimiyah tidak lepas dari konsep keadilan, bahwa penguasa sebagai sosok manusia yang pada posisi institusi negara berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya.

Karena hakikat manusia pada prinsipnya bersifat Madany, suka membangun suka berkumpul dan mengembangkan potensi diri dengan berbagai kegiatan dalam rangka

mewujudkan kemaslahatan dalam mengatasi persoalan. Maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah kerjasama antara ruler dan ruled, antara pemerintah dan rakyat (Taimiya, Ibnu Taimiyah, Arif Maftuhin Dzofirh, 2004)

Dalam rangka mewujudkan suatu negara yang aman, tertib dan tanpa konflik seperti yang terjadi di Afghanistan, maka menurut Ibnu Taimiyah kebolehan “memaksa” bagi Negara jika diperlukan untuk menjaga solidaritas dan ketentraman hidup di masyarakat. Egoisme manusia sering muncul secara alamiah tanpa sebab yang pasti, proses alamiah tersebut dalam rangka mendapatkan legitimasi dengan menjalin kerjasama dan perjanjian untuk hidup bersama. Sehingga menuntut adanya kepatuhan bagi rakyat untuk mentaati pemerintah. Ada satu argument yang sangat nyentrik dari Ibnu Taimiyah “kepatuhan terhadap penguasa yang tidak adil adalah keharusan, karena walaupun sang penguasa tidak dapat berbuat adil hal itu masih lebih baik dari pertikaian dan bubarnya sebuah negara. berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita” (Hourani et al., 2004).

Dari statemen Ibnu taimiyah tersebut menurut penulis bahwa pendudukan Taliban atas pemerintahan Afghanistan juga disebabkan oleh egoisme manusia itu sendiri, utamanya ditujukan kepada penguasa yang tidak memberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya yang menyebabkan rakyat semakin tidak percaya dengan janji-janji penguasa yang hanya retorika belaka. Menurut Ibnu Taimiyah mahluk adalah hamba tuhan dan para pemimpin merupakan wakil tuhan terhadap hambanya, dan mereka pun merupaan wakil dan hamba tuhan atas diri mereka sendiri, “sultan, raja kepala negara, presiden atau apapun sebutannya merupakan bayang bayang tuhan di atas bumi. Artinya bahwa sumber kekuasaan yang

sebenarnya berada pada sang kuasa (Ibnu. Taimiyah, 1999).

Kemudian pemikiran lainnya tentang konsep negara menurut Ibnu Taimiyah adalah membolehkan peralihan sistem pemerintahan, misalnya dari bentuk khalifah berubah menjadi pemerintahan atau imarah, ataupun berubah menjadi system kerajaan almulk, hal ini atas dasar pertimbangan terhadap kemampuan atas ilmu-ilmu agama. Hal ini pernah dialami oleh negara Afghanistan yang semula berbentuk kekaisaran pada era Hotaki dan Durrani di Abad ke-18 dan kini berubah menjadi republik Islam Presidensial utari, dengan islam sebagai agama yang resmi (“BBCNazer.com, n.d.).

Apapun perubahan dari bentuk negara tidak menjadi persoalan menuu Ibnu Taimiyah, karna Negara adalah organisasi yang mengharuskan adanya kerjasama sesama untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta (Swasana, 2018), yang paling urgent dalam hal pendudukan Taliban atas Afghanistan adalah “seorang pemimpin”, tanggung jawab pemimpin sangat besar dalam masyarakat. Pemerintah adalah salah satu prantara dalam menyatukan agama Islam, didalam alqur’an tidak mengharuskan bagi suatu wilayah untuk membentuk negara Islam, yang paling utama adalah unsur-unsur esensi yang melatarinya, unsur-unsur tersebut diantaranya unsur keadilan, persaudaraan, persmaan, keputusan yang tepat. Menurut Ibnu Taimiyah jika agama tidak diposisikan pada tempatnya akan berbahaya dan menjelma menjadi negara yang tirani, sebaliknya jika kekuasaan diletakkan sebagai sebuah amanah, maka akan tercipta sebuah negara yang sejahtera yang minim akan konflik sebagaimana konflik yang tidak berkesudahan dialami oleh Afghanistan.

Sekali lagi terkait dengan bentuk negara tidak menjadmin akan terciptanya suatu ketentraman dan

kesejahteraan bagi penduduknya, Ibnu Taimiyah tidak terlalu mepersoalkannya, menurutnya Islam lahir sebagai suatu tatanan social yang mempunyai hokum tertinggi yakni hokum Allah, karenanya Ibnu Taimiyah tidak tertarik untuk mempermasalahkannya, walaupun ia mengakui akan negara sebagai kebutuhan agama.

Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan Perspektif Ibnu Taimiyah

Pada tahun 1979 Negara Soviet mulai meluncurkan aksinya dengan menyebarkan tentaranya ke Kabul. Hingga 15 mei 1988 tentara Soviet meninggalkan Afghanistan, kurang lebih sepuluh tahun lamanya.(Runion, n.d.) Di era 1980 an, Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Saat itu terdapat pejuang jihad yang memerangi pasukan asing yang disebut mujahideen. Dengan bantuan Amerika, pejuang mujahideen pun berhasil mengusir Uni Soviet. Lalu mujahideen terpecah dan memegang kendali pemerintahan Afghanistan, saat itu pemerintahan dipegang oleh Rabbani. Namun, pemerintahan Rabbani dinilai menyengsarakan rakyat karena korup, lemah, anti-Pashtun dan gagal dalam membangun Afghanistan. Bahkan, selama empat tahun terjadi perang saudara antara kelompok mujahideen dari tahun 1992 yang dijadikan momentum oleh para ulama islam. Pada tahun 1993-1994, ulama Islam Afghanistan dan mahasiswa, sebagian besar dari pedesaan, asal Pashtun, membentuk gerakan Taliban. Taliban berasal dari bahasa Arab yang artinya para pelajar (*Sepak Terjang Taliban Picu Kekecewaan / Republika Online*, n.d.)

Taliban dibentuk oleh Mullah Mohammad Omar dengan ideologi islamis-nasionalis. Rezim Taliban di Afghanistan berdiri pada tahun 1996 dengan nama Negara Emirat Islam Afghanistan, dikepalai oleh Mullah Mohammad Omar. (Katzman,2011) Taliban diinisiasi sebagai

kelompok perlawanan Islam yang begitu ekstrim saat ini, mulai bermunculan spektrum-spektrum baru yang menyatakan bahwa Taliban perlu diperhitungkan, utamanya pada akhir tahun 1990 hingga 11 september 2011, tema dan perihal tentang Taliban mulai diperbincangkan secara masip.(Durrotun Nafisah, 2019)

Hampir dari Sembilan puluh persen, saat ini wilayah pemerintahan dikuasai oleh Taliban. Taliban telah menguasai Kabul, Kerat, Jalabad, Kandahar dan wilayah strategis Afghanistan lainnya. Sehingga secara jelas bahwa pendudukan Taliban atas pemerintahan Afghanistan tercapai. (Hadibroto, 2002).

Karena hukum yang ditegakkan oleh Taliban dinilai melanggar Hak Asasi Manusia oleh negara-negara barat, rezim Taliban hanya diakui oleh negara Pakistan, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Taliban diisolasi oleh negara-negara lain di dunia karena puncaknya ketika Amerika meminta Taliban menyerahkan Osama bin Laden untuk diekstradisi, Taliban pun menolak.(Katzman, 2014,)

Hingga akhirnya pada tahun 2001, Amerika Serikat bersama dengan NATO menggulingkan rezim Taliban dalam Operation Enduring Freedom. Setelah jatuhnya rezim Taliban, ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama untuk Taliban kembali muncul. Saat itu Taliban muncul bahkan lebih kuat di Pakistan, Aktifitas Taliban meningkat di tahun 2007 dengan banyaknya kejadian pelemparan bom, Taliban juga menggunakan taktik menculik turis dan meminta tebusan di tahun ini. Bahkan Taiban semakin menunjukkan keberaniannya di tahun 2008 dengan merambah cara-cara bom bunuh diri, seakan ingin menunjukkan keberaniannya sudah mencapai puncak. Lalu di tahun 2009 Taliban menunjukkan modernisasi persenjataan. Taliban tidak ragu-ragu

memancing baku tembak dengan pasukan internasional di tahun 2010, bahkan Taliban berani menargetkan pangkalan internasional. Di tahun ini pula, Taliban diyakini meningkatkan gerakannya dalam produksi opium di Afghanistan. Di tahun 2011, gerakan Taliban menunjukkan semakin terencananya strategi serangan dengan menggunakan persenjataan yang lebih canggih dan menargetkan kedutaan besar serta pangkalan asing. Gerakan Taliban tidak hanya sampai disitu saja, di tahun 2012, serangan Taliban tetap meningkat walaupun Amerika Serikat telah mengurangi aktifitas militer di Afghanistan, bahkan tahun 2013 menjadi tahun dengan serangan terpanas Taliban walaupun Amerika telah mengubah strateginya dari melibatkan secara agresif militernya, hingga menjadi sebatas memberikan dukungan untuk pemerintah dan pasukan keamanan Afghanistan.

Untuk mengatasi gerakan dan serangan Taliban di tahun-tahun tersebut, Amerika Serikat menekan Taliban melalui kegiatan yang dilakukan ISAF (International Security Assistance Force). Dengan ditempatkannya pasukan tentara Amerika yang digabungkan dengan pasukan koalisi (ISAF) beserta pasukan keamanan Afghanistan, Amerika yakin bahwa Taliban akan merasa tertekan dan mengurangi aktifitasnya. Di tahun 2007, Amerika memperluas penempatan pasukan ISAF. Di tahun 2008, Amerika memberikan tanggung jawab kepada ISAF untuk menciptakan keamanan, mendorong perbaikan pemerintah dan pembangunan negara, membantu mereformasi sistem hukum, melatih polisi dan militer Afghanistan, menciptakan keamanan ketika pemilihan presiden, dan menyediakan bantuan kepada pengusaha lokal untuk mengatasi industri narkotika (Morelli & Belkin, 2009)

Di tahun 2010, Amerika menekan Taliban dengan langsung menyerang Taliban di lapangan, dengan salah satu contohnya adalah operasi Omid

yang berhasil membuat Taliban kehilangan salah satu wilayah pertahanannya. Di tahun 2011, Amerika melakukan operasi besar-besaran untuk menembus benteng pertahanan Taliban. Di tahun 2012, Amerika mulai mengurangi operasi militer secara offensive dan lebih fokus pada pelatihan pasukan Afghanistan. Hingga akhirnya, Amerika mengubah strateginya dari “tempur” menjadi “support” pada Juni 2013 (Katzman, 2014). Di tahun ini, pasukan ISAF telah ditempatkan di seluruh wilayah Afghanistan. Dengan ditempatkannya pasukan ISAF di seluruh wilayah Afghanistan akan semakin menekan Taliban.

Walaupun pemerintahan Afghanistan khawatir atas tindakan dan aksi Taliban, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan pemulangannya dari negeri konflik Afghanistan pada tanggal sebelas September, pasca menukarkan kekuatan Amerika Serikat, Taliban semakin gentol untuk melancarkan aksinya dengan merebut beberapa wilayah di Afghanistan. Inilah beberapa sejarah singkat dan faktor yang menyebabkan konflik diantara pemerintahan Afghanistan dan Taliban.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana di dalam kitabnya *Assiyasah as-syariah fi islah ar-ra' wa ar raiyah*, Negara tergantung kepada pemimpin-nya, dan untuk menciptakan tatanan Negara yang damai dan aman dibutuhkan *amanah*, agar ketika mengambil sebuah keputusan dapat berlaku adil dalam sebuah permasalahan termasuk dalam hal ini kasus pendudukan Taliban atas pemerintahan Afganistan. Disisi lain untuk menciptakan kesejahteraan tentu dibutuhkan bermasyarakat dan bernegara, karenanya setiap kehidupan manusia tergantung kepada adanya Negara dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama serta sebagai sarana menuju kepada kesejahteraan.

Kesimpulan

Pemikiran Ibnu Taimiyah, tentang politik bahwa politik direduksi dari hasil pemikiran yang mendalam ulama dalam berijtihad sebagai sarana untuk merefleksikan pemikiran rasional untuk mencari dasar intelektual tentang peran dan fungsi negara sebagai kantor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang negara bahwa eksistensinya sangat dibutuhkan untuk melindungi agama, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bukan pula tujuan utama, karena yang paling utama dari sebuah negara adalah terciptanya tatanan negara dan politik yang adil dan sejahtera. dibutuhkan kerjasama antara ruler dan ruled, antara pemerintah dan rakyat.

Pendudukan Taliban atas Afganistan tidak lepas dari nuansa politik yang melatarinya, dan melibatkan banyak aktor didalamnya, seperti alqaeda, iran, Saudi Arabiyah dan Taliban. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Assiyasah as-syariah fi islah ar-ra'I wa ar raiiyah*, Negara tergantung kepada pemimpin-nya, dan untuk menciptakan tatanan Negara yang damai dan aman dibutuhkan *Amanah* dan *Keadilan* agar ketika mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan dapat berlaku adil.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2017). (n.d.). *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Google Books*. Kencana.
- Durrotun Nafisah. (2019). AFGHANISTAN DI BAWAH PEMERINTAHAN TALIBAN TAHUN 1996-2001 M. In *skripsi* (Nomor 2, hal. 1–13).
- Engineer, A. A., Mutaqin., & Kamdani. (2000). *Devolusi negara Islam*. Pustaka Pelajar.
- Farid, Ahmad, S. (n.d.). *60 biografi ulama salaf / Syaikh Ahmad Farid ; penerjemah, Masturi Irham, Asmu'i Taman ; editor, M. Yasir Abdul Muthalib | OPAC Perpustakaan Nasional RI*.
- Hadibroto, I. (2002). *Perang Afganistan dibalik Persetujuan AS vs Taliban*.
- Halim, A. (2013). *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*. LKiS Yogyakarta.
- Hourani, A. H., Suparno., Setiawan, D., & Hilmi, I. (2004). *Pemikiran liberal di dunia Arab*. 676.
- Ibnu Taimiyah. (1962). *Minhaju al Sunnati al Nabawiyati fi Naqdhi Kalami al Syi'ati wa al Qadariyati*.
<https://onesearch.id/Record/IOS2875.slims-30203>
- Jindan, K., & Masrohin. (1995). *Teori politik Islam : telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*. 170.
- Katzman, K 2014, *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy*. Congressional Research Service, diakses 23 Agustus 2021,
- Katzman, K. (2011). Afghanistan: Post-war governance, security, and U.S. policy. *Economic, Political and Social Issues of Asia*, 299–345.
- Khan, Q.-D. (2007). *The political thought of IBN Taymiyah*. 216.
- Khurun'in, I. (2017). Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan. *Transformasi Global*, 3(1).
<https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/50>
- Knipp, K. (2021). Iran-Taliban, Musuh Bebuyutan yang Saling Mendekat Demi Kepentingan Bersama. *Dw*, 1. Iran-Taliban, Musuh Bebuyutan yang Saling Mendekat Demi Kepentingan Bersama
- Lapidus, I. M., & Mas'adi, G. A. (1999). *Sejarah sosial ummat islam*. 103.
- Majid fakhry; (2002). *Sejarah filsafat islam :sebuah peta kronologis*. Mizan.
<http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=226>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1991). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Morelli, V., & Belkin, P. (2009). *CRS Report for Congress*. www.crs.gov
- Nainggolan, P. P. (2021). *Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis bidang hubungan internasional. XIII*.
- Nasution, H. (2002). *Ensiklopedi Islam Indonesia* (1 ed., Vol. 1). Penerbit Djambatan.

- Rosyada, Dede. (2003). *Pendidikan kewarganegaraan (civil education) : Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17201>
- Runion, M. L. (n.d.). *The history of Afghanistan*. 263.
- Sepak Terjang Taliban Picu Kekecewaan / Republika Online*. (n.d.). Diambil 13 Oktober 2021,
- Suharti. (2015). *View of Al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*.
- Swasana, i. (2018). *Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)*.
- Taimiyah, Ibnu. (1999). *Siyasah syariah : etika politik islam*. 190.
- Taimiyah, IBNU. (n.d.). *al-siyasah al-syar'iyah fi ishlah al-ra'i wa al-ra'iyah*. Dar al-Iman.
- Taimiya Ibnu Taimiyah, Arif Maftuhin Dzofirh, I. (2004). *Tugas Negara Menurut Islam - Ibnu Taimiyah*. Pustaka Pelajar.
- Jatim Network. Taliban Merebut Kekuasaan di Afghanistan, Berikut Hal-hal yang Kemungkinan Besar Akan Terjadi* - (n.d.).